

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU RI No.10 tahun 1998).

2.1.1 Risiko Usaha Bank

Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan.

Risiko yang dihadapi perbankan meliputi (Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003):

1. Risiko kredit: risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya.
2. Risiko pasar: risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar meliputi suku bunga dan nilai tukar.
3. Risiko likuiditas: risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
4. Risiko operasional: risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia,

kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

5. Risiko hukum: risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
6. Risiko reputasi: risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
7. Risiko strategik: risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank atau pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
8. Risiko kepatuhan: risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

2.1.2 Bank Pembangunan Daerah

Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan maksud khusus untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana (UU No 13 tahun 1962). Tujuan awal didirikannya Bank Pembangunan Daerah adalah untuk mengemban misi publik sehingga orientasi profit tidak menjadi fokus. Bank Pembangunan Daerah didirikan di daerah-daerah tingkat I, dan saat ini terdapat 26 Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia.

BPD memiliki relasi yang tidak dapat dipisahkan dengan perekonomian daerah, dimana BPD tersebut berdiri (Sunarsip 2009, paragraf 2). Makanya, tidak mengherankan bila BPD selalu melekat nama daerah asal BPD didirikan. Selain menjalankan kegiatan bank umum, BPD juga berfungsi sebagai kasir Pemda, seperti

dana realisasi APBD. Sehingga, BPD memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelompok bank lainnya (BUMN, swasta, asing dan campuran) yakni sebagian besar DPK merupakan dana milik pemerintah, khususnya Pemda.

Pendirian BPD adalah untuk mendorong pembangunan di daerah. BPD diarahkan untuk menopang pembangunan infrastruktur, UMKM, pertanian, dan lain-lain kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan daerah. Awalnya, peran ini telah dapat dijalankan dengan baik oleh BPD. Namun, dalam perkembangannya, peran tersebut mulai tergoyahkan. Fenomena ini dapat dilihat dari struktur pendanaan (dana pihak ketiga/DPK) dan pembiayaan yang dimiliki oleh BPD.

Berbeda dari perbankan secara umum, fokus DPK BPD adalah giro (Sunarsip 2009, paragraf 4). Walaupun giro adalah dana termurah, namun perlu digarisbawahi bahwa giro juga yang paling tidak stabil/*volatile*. Porsi tabungan dan deposito di BPD masih relatif kecil, sehingga cukup sulit bagi BPD untuk menjadi bank yang dapat membiayai kredit jangka panjang/investasi.

2.2 Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (UU No. 10 tahun 1998).

2.2.1 Prinsip Pemberian Kredit

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan maka kredit dapat berlangsung bila ada kepercayaan terhadap penerima kredit. Kepercayaan tersebut banyak tergantung kepada kelayakan seseorang atau badan usaha. Kelayakan seseorang atau badan usaha penerima kredit dipengaruhi oleh 5C yaitu:

1. *Character* atau tabiat serta kemauan pemohon untuk memenuhi kewajiban. Perlu diteliti tentang kebiasaan kepribadian, cara hidup dan keadaan keluarga serta moral.
2. *Capacity* yaitu kemampuan, kepandaian dan ketrampilan menggunakan kredit yang diterima sehingga memperoleh kemajuan, keuntungan serta mampu melunasi kewajiban atau utangnya.
3. *Capital* yaitu modal seseorang atau badan usaha penerima kredit. Tidak semua modal harus bersumber dari kredit.
4. *Collateral*, yaitu kepastian berupa jaminan yang dapat diberikan oleh penerima kredit. Anggungan atau jaminan sebagai alat pengaman dari ketidakpastian pada waktu yang akan datang pada saat kredit harus dilunasi.
5. *Condition of economies* yaitu dalam rencana pelepasan kredit harus mampu melihat ke depan, yaitu bagaimana keadaan perekonomian masa yang akan datang.

2.2.2 Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko debitur tidak dapat dan tidak mau membayar kembali hutang dan bunga yang merupakan kewajibannya. Bank sangat memperhatikan risiko ini, mengingat sebagian besar bank melakukan pemberian kredit sebagai bisnis utamanya. Sampai saat ini, sejarah menunjukkan bahwa risiko kredit merupakan kontributor utama yang menyebabkan kondisi bank memburuk, karena nilai kerugian yang ditimbulkan sangat besar sehingga mengurangi modal bank secara cepat.

2.3 Non Performing Loan (NPL)

Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL), adalah kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian diusaha debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas (Rivai 2006, hal 476).

Berdasarkan Surat Edaran BI no. 7/10/DPNP, tanggal 31 Maret 2005 NPL dibedakan menjadi dua yaitu NPL Gross dan NPL Nett:

$$\text{NPL Gross} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Kredit, merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ke tiga, tidak termasuk kredit kepada bank lain.
- Kredit bermasalah adalah kredit dengan kurang lancar, diragukan, dan macet.
- Kredit bermasalah dihitung secara gross (tidak dikurangi PPA – Penyisihan Penghapusan Aktiva)
- Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan)

$$\text{NPL Nett} = \frac{\text{Kredit Bermasalah} - \text{PPA Produktif}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Kredit, merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ke tiga, tidak termasuk kredit kepada bank lain.
- Kredit bermasalah adalah kredit dengan kurang lancar, diragukan, dan macet.
- PPA Produktif adalah Penyisihan Aktiva Produktif yang telah dibentuk untuk kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan)

Kredit berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari debitur sendiri, kreditur dan dari kondisi eksternal. Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab kredit bermasalah (Rivai 2006, hal 478), yaitu:

a. Faktor kesalahan kreditur/bank:

- Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon debitur.
- Kurang tajam dalam menganalisis maksud dan tujuan kredit dan sumber pembayaran kembali.
- Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon debitur dan manfaat kredit yang diberikan.
- Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon debitur.
- Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat.
- Terlalu agresif.
- Sikap memudahkan dari pejabat bank atau *account officer*.

b. Faktor kesalahan debitur:

- Debitur tidak kompeten.
- Debitur tidak atau kurang pengalaman.
- Debitur kurang memberikan waktu untuk usahanya.
- Debitur tidak jujur.
- Debitur serakah.

c. Faktor eksternal:

Perubahan pada faktor eksternal seperti perubahan-perubahan lingkungan politik dan hukum, deregulasi sektor riil, financial dan ekonomi dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan kepada debitur, sehingga diidentifikasi dapat menjadi penyebab kredit bermasalah. Kredit bermasalah akan timbul oleh *external environment* sebagai akibat gagalnya pengelola dengan tepat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan, seperti:

- Kondisi perekonomian.
- Perubahan-perubahan peraturan.
- Bencana alam.

Secara akuntansi perbankan, kredit *non perform* berdampak kepada biaya yang harus dikeluarkan bank sehingga bank kehilangan sebagian keuntungan atau laba (Pasha 2007, hal 146). Untuk mengkompensasi kehilangan sebagian keuntungannya tersebut

bank akan meningkatkan beban bunga kredit. Biaya-biaya yang timbul adalah biaya penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang kemudian akan diikuti dengan meningkatnya biaya administrasi, biaya tenaga kerja, dan biaya litigasi dan reputasi.

2.3.1 Tingkat Kolektibilitas Yang Ditetapkan Oleh Bank Indonesia

Tingkat kesehatan bank merupakan hal terpenting yang harus diusahakan oleh manajemen bank. Pengelola bank diharuskan memantau keadaan kualitas aktiva produktif yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatannya.

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada tingkat kolektibilitasnya. Penggolongan kolektibilitas aktiva produktif sampai sejauh ini hanya terbatas pada kredit yang diberikan. Ukuran utamanya adalah ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari usaha maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, penggolongan kredit dibedakan menjadi:

1. Kredit Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Pembayaran pokok dan atau bunga tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit;
 - b. Dokumentasi kredit lengkap;
 - c. Tidak terdapat pelanggaran perjanjian kredit.
2. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;
 - b. Jarang mengalami cerukan;
 - c. Dokumentasi kredit lengkap;
 - d. Terdapat pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.

3. Kredit Kurang Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari;
 - b. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
 - c. Dokumentasi kredit kurang lengkap;
 - d. Terdapat pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit yang cukup prinsipil.
4. Kredit yang diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
 - c. Dokumentasi kredit tidak lengkap;
 - d. Terdapat pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
5. Kredit macet, apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - b. Tidak terdapat dokumentasi kredit;
 - c. Pelanggaran yang sangat prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

Manfaat dari kolektibilitas kredit (Hasibuan 2005, hal 115) adalah:

1. Untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia.
2. Untuk mengetahui perkembangan jumlah kredit lancar, cukup lancar, kurang lancar, dan tidak lancar.
3. Untuk mengetahui jumlah kredit yang produktif, cukup produktif, kurang produktif, dan tidak produktif.

4. Untuk meningkatkan pengawasan dan penagihan kredit.
5. Sebagai tolok ukur kemampuan analisis kredit, apakah mampu atau tidak. Jika sebagian besar yang disalurkan tergolong lancar atau cukup lancar berarti analisis kredit mampu. Sebaliknya, jika kredit yang tergolong kurang lancar atau malah tidak lancar berarti analisis kredit tidak mampu.
6. Sebagai tolok ukur baik atau tidaknya kebijaksanaan perkreditan yang dilakukan manajer bank bersangkutan.
7. Sebagai tolok ukur tingkat kesehatan bank oleh Bank Indonesia.
8. Untuk mengetahui jumlah piutang yang akan dihapuskan.
9. Sebagai *tool of management* bagi manajer bank dalam perkreditannya.

2.3.2 Penyisihan Penghapusan Aktiva

Berdasarkan PBI no. 7/2/PBI/2005, perbankan nasional diwajibkan membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) kredit paling kurang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. PPA yang dibentuk untuk kredit berupa cadangan umum dan cadangan khusus, besarnya cadangan umum minimal 1% dari kredit dengan kualitas lancar, sedangkan besarnya cadangan khusus adalah:

- a. 5% (lima perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan.
- b. 15% (lima belas perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan.
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
- d. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan.

2.4 Tingkat Inflasi

2.4.1 Pengertian

Inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara (Khalwaty 2000, hal 5). Sedangkan menurut Sukirno (2004, hal 14) inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian.

Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan itu meluas dan mengakibatkan kenaikan kepada barang-barang lainnya. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Adakalanya tingkat inflasi adalah rendah, yaitu mencapai dibawah 2 atau 3 persen. Tingkat inflasi yang moderat mencapai di antara 4 – 10 persen. Inflasi yang sangat serius mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus dalam setahun.

Terdapat dua pandangan mengenai inflasi, yaitu pandangan *Moneterist* dan pandangan *Keynesian*. Menurut bapak kaum monetarist, Milton Friedman, inflasi yang tinggi dan terus menerus hanya akibat kenaikan uang beredar yang tinggi, baik berupa uang kartal maupun giral. Inflasi selalu dan setiap saat merupakan fenomena moneter. Tetapi pergerakan naik dalam tingkat harga merupakan fenomena moneter hanya jika dalam suatu proses yang terus menerus. Bertambahnya jumlah uang menyebabkan turunnya suku bunga selama tidak berada pada kondisi *liquidity trap*. Untuk mengatasi tingginya inflasi sangat sederhana yaitu dengan mengurangi tingkat pertumbuhan uang beredar ke tingkat yang rendah.

Menurut pandangan *Keynesian* inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif

masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat), sehingga terjadi *inflationary gap*. Keterbatasan penawaran agregat ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Sama seperti pandangan kaum *Moneterist*, pandangan *Keynesian* ini lebih banyak digunakan untuk menerangkan fenomena inflasi dalam jangka pendek.

Indikator inflasi adalah:

1. Indeks harga konsumen (IHK) atau *consumer pricing index* merupakan indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. IHK diperoleh berdasarkan survey bulanan di 45 kota, di pasar tradisional dan modern terhadap 283 – 397 jenis barang / jasa di setiap kota dan secara keseluruhan terdiri dari 742 komoditas.
2. Indeks Harga Perdagangan Besar merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan di suatu daerah.

2.4.2 Jenis Inflasi

Inflasi dapat dibagi menjadi:

1. Inflasi inti, yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental :
 - Interaksi permintaan – penawaran (*demand – supply*)
 - Lingkungan eksternal : nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang.
 - Ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen.

2. Inflasi non inti, yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh faktor lain selain faktor fundamental yang terdiri dari:
- Inflasi *Volatile Food*, inflasi yang dipengaruhi *shocks* dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, gangguan penyakit.
 - Inflasi *Administered Prices*, inflasi yang dipengaruhi *shocks* berupa kebijakan harga pemerintah, seperti harga BBM, tarif dasar listrik, tarif angkutan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penyebab terjadinya, inflasi dibedakan menjadi:

1. *Cost Push Inflation*

Jenis inflasi ini timbul karena adanya tekanan dari sisi penawaran yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

2. *Demand Pull Inflation*

Inflasi ini terjadi karena adanya tekanan dari sisi permintaan dalam kondisi *full employment* yang menyebabkan terjadinya *excess demand* di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ekspansi kebijakan moneter, seperti peningkatan belanja Negara dan peningkatan jumlah uang beredar, dimana tingkat permintaan barang menjadi tinggi sedangkan persediaan barang relatif tetap.

Selain *cost-push inflation* dan *demand-pull inflation*, inflasi juga dapat ditimbulkan dari ekspektasi inflasi itu sendiri, yang dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga ditingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal), tahun baru dan penentuan upah minimum regional (UMR).

Inflasi dapat dibedakan berdasarkan tingkatannya (Samuelson & Nordhaus 2004, hal 385), yaitu:

1. Inflasi rendah

Inflasi rendah dicirikan oleh harga yang naik perlahan-lahan dan dapat diramalkan. Kita dapat mendefinisikan sebagai tingkat inflasi tahunan dengan digit tunggal.

2. Inflasi yang melambung

Inflasi dalam cakupan digit ganda atau *triple*, misalnya 20, 100, atau 200 persen per tahun disebut “inflasi melambung”. Ketika inflasi melambung menjadi berakar, distorsi ekonomi serius timbul. Pada kondisi ini uang kehilangan nilainya dengan sangat cepat, sehingga orang-orang hanya akan memegang uang dengan jumlah yang sangat minim yang dibutuhkan untuk transaksi sehari-hari saja.

3. Hiperinflasi

Disebut hiperinflasi adalah suatu keadaan harga-harga meningkat seribu, atau jutaan atau bahkan miliaran persen per tahun. Terdapat beberapa ciri dari hiperinflasi, yaitu: *Pertama*, stok uang nyata menurun dengan drastis. *Kedua* harga menjadi relatif sangat tidak stabil.

2.4.3 Faktor-Faktor Penyebab Inflasi

Masalah kenaikan harga-harga yang berlaku di berbagai negara diakibatkan oleh banyak faktor. Di negara-negara industri, pada umumnya inflasi bersumber dari salah satu atau gabungan dari dua masalah berikut (Sukirno 2004, hal 14):

- a. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Keinginan untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan akan mendorong para konsumen meminta barang itu pada harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, para pengusaha akan mencoba menahan barangnya dan hanya menjual kepada pembeli-

pembeli yang bersedia membayar pada harga yang lebih tinggi. Kedua kecenderungan ini akan menyebabkan kenaikan harga-harga.

- b. Pekerja-pekerja diberbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Apabila para pengusaha mulai menghadapi kesukaran dalam mencari tambahan pekerja untuk menambah pekerja yang ada, maka pekerja akan terdorong untuk menuntut kenaikan upah. Apabila tuntutan kenaikan upah berlaku secara meluas, akan terjadi kenaikan biaya produksi dari berbagai barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Kenaikan biaya produksi tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan menaikkan harga barang-barang mereka.

Kedua masalah yang diterangkan diatas biasanya berlaku apabila perekonomian sudah mendekati tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Dengan perkataan lain di dalam perekonomian yang sudah sangat maju, masalah inflasi sangat erat kaitannya dengan tingkat penggunaan tenaga kerja.

Di samping itu inflasi dapat pula berlaku sebagai akibat dari:

1. Kenaikan harga-harga barang yang diimpor.
2. Penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang.
3. Kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab.

2.4.4 Dampak Inflasi

Inflasi berdampak pada perekonomian, yaitu terhadap redistribusi dan distorsi, sebagai berikut:

- Redistribusi pendapatan dan kekayaan.
Salah satu contoh adalah redistribusi dari kreditur ke debitur, debitur dikenakan tingkat bunga tetap untuk pinjamannya yang digunakan untuk

membeli asset tertentu, namun ternyata tingkat inflasi lebih besar daripada tingkat bunga, sehingga kreditur secara riil menjadi lebih miskin, namun sebaliknya, debitur mengalami peningkatan kekayaan karena harga asset yang dibelinya meningkat harganya, minimal sebesar tingkat inflasi.

- Distorsi harga

Pada tingkat inflasi yang rendah, orang menyadari adanya inflasi tersebut dan dapat membedakan perbedaan inflasi antar barang yang saling substitusi. Namun pada tingkat inflasi yang tinggi, orang tidak memahami perbedaan laju inflasi karena harga semua barang naik tinggi.

- Distorsi penggunaan uang.

Adanya inflasi mengubah cara orang menggunakan uangnya. Karena inflasi menurunkan nilai riil uang, maka orang cenderung meminimalisasi jumlah uang yang dipegangnya.

- Distorsi pajak.

Semakin tinggi inflasi, semakin tinggi beban pajak secara riil.

Selain itu salah satu akibat penting dari inflasi adalah cenderung menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. Sebagian besar pelaku-pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari pekerja-pekerja yang bergaji tetap. Inflasi biasanya berlaku lebih cepat dari kenaikan upah para pekerja. Oleh karena itu upah riil para pekerja akan merosot disebabkan oleh inflasi dan keadaan ini berarti tingkat kemakmuran segolongan besar masyarakat mengalami kemerosotan.

2.4.5 Pengaruh Inflasi Terhadap Kredit Bermasalah (NPL)

Berdasarkan teori, inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara dan kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian.

Bagaimana inflasi dapat berpengaruh terhadap kredit bermasalah? Inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga turun. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat suku bunga riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan kepada nilai tukar rupiah. Dengan meningkatnya inflasi maka akan mengakibatkan kemampuan nasabah dalam membayar cicilan kreditnya juga akan terganggu (Basri 2002, hal 53).

Sebelum inflasi meningkat, seorang debitur masih sanggup untuk membayar angsuran kreditnya, namun setelah inflasi terjadi, harga-harga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sedangkan penghasilan debitur tersebut tidak mengalami peningkatan, maka kemampuan debitur tersebut dalam membayar angsurannya menjadi melemah sebab sebagian besar atau bahkan seluruh penghasilannya sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai akibat dari harga-harga yang meningkat.

Lalu seandainya suku bunga pinjaman kreditnya tidak tetap (*floating rate*), maka hal tersebut akan memperparah kondisi debitur tersebut sebab suku bunga pinjaman akan meningkat dikarenakan suku bunga SBI juga meningkat.

Dengan kondisi tersebut maka kemungkinan besar pinjaman debitur tersebut akan macet karena debitur tidak dapat membayar angsuran kreditnya. Dan jika sebagian besar debitur bank tidak dapat membayar angsuran kreditnya maka dapat dipastikan *Non Performing Loan* (NPL) bank akan meningkat.

McClatchy (2009), menjelaskan bahwa *rising inflation will see banks raising their deposit rates, which translates into increased cost of funds. With the rising cost of*

funds resulted in higher mortgage interest rate and may result in an increased of non-performing loans.

Selain itu Atmadja (1999, hal 64) juga menjelaskan bahwa salah satu penyebab tingginya inflasi adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Sewaktu Indonesia mengalami krisis moneter yang selanjutnya menjadi krisis ekonomi, inflasi di Indonesia dipicu oleh kenaikan harga komoditi impor dan membengkaknya hutang luar negeri akibat dari terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, dan mata uang asing lainnya. Akibatnya untuk mengendalikan tekanan inflasi maka terlebih dahulu harus dilakukan penstabilan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing.

Dalam menstabilkan nilai kurs, pemerintah Indonesia cenderung lebih banyak memainkan instrumen moneter melalui otoritas moneter dengan *tight money policy* yang diharapkan selain dapat menarik minat para pemegang valuta asing untuk menginvestasikan modalnya ke Indonesia melalui deposito, juga dapat menstabilkan tingkat harga umum.

Tight money policy yang dilakukan dengan cara menaikkan tingkat suku bunga SBI sangat tinggi, pada satu sisi akan efektif untuk mengurangi *money supply* tetapi di sisi lain akan meningkatkan suku bunga kredit untuk sektor riil sebagai akibat dari meningkatnya suku bunga deposito perbankan. Jika hal tersebut terus terjadi maka kemungkinan terjadinya kredit macet cukup besar.

Hemawan (2008, hal 1 – 5) menjelaskan bahwa tekanan pada kondisi ekonomi global juga berdampak pada kontraksi ekonomi makro Indonesia. Kajian Bank Indonesia pada April 2008 menginformasikan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I/2008 disebabkan oleh *pertama*, pertumbuhan ekonomi daerah yang melambat, dengan penyebab utama menurunnya tingkat konsumsi dan ekspor, melemahnya daya beli masyarakat, serta menurunnya permintaan luar negeri

seiring dengan perlambatan ekonomi global. Penyebab lainnya adalah faktor sektoral, yaitu melambatnya kinerja sektor perdagangan sebagai respon atas melambatnya permintaan domestik karena meningkatnya biaya produksi sebagai dampak kenaikan harga bahan baku dan BBM.

Kedua adalah meningkatnya inflasi, dengan faktor pendorong eksternal (*imported inflation*) adalah kenaikan harga minyak dunia dan beberapa komoditas di pasar internasional, serta faktor domestik berupa gangguan pasokan karena kerusakan infrastruktur akibat dari ‘anomali’ cuaca dan meningkatnya harga beberapa komoditas utama.

Strategi Bank Indonesia dalam menekan laju inflasi melalui piranti moneter misalnya *BI rate*, pengendalian volatilitas nilai tukar, penyerapan eksekusi likuiditas, optimalisasi Operasi Pasar Terbuka (OPT) maupun instrumen lain secara efektif dan simultan. Sejauh ini melalui *BI rate* terbukti relatif efektif dalam menekan laju inflasi.

Peningkatan *BI rate* merupakan ‘pil pahit’ yang harus ditelan oleh pelaku dunia usaha agar inflasi tidak berdampak bola salju (*snow ball effects*) yaitu semakin memperparah kondisi lingkungan bisnis. Meningkatnya inflasi dan *BI rate* akan menekan laju kredit perbankan. Namun demikian dampak meningkatnya inflasi yang seiring dengan meningkatnya belanja masyarakat, akan bermuara pada menurunnya daya beli masyarakat sehingga berpotensi akan meningkatkan NPL.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006, hal 80 – 81) dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada nasabah bank perkreditan rakyat (BPR) di kota Semarang pada tahun 2006. Penelitian tersebut mencoba untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kredit bermasalah pada BPR di kota Semarang. Hasil penelitian tersebut khususnya untuk pengaruh tingkat pendapatan terhadap NPL adalah tingkat pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kredit bermasalah pada BPR di kota Semarang. Seperti

diketahui, dengan meningkatnya tingkat inflasi maka akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh pula terhadap NPL.

2.5 Sertifikat Bank Indonesia

SBI adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Ada dua macam SBI, yaitu yang berjangka waktu satu bulan dan tiga bulan. Dua pekan sekali Bank Indonesia melakukan lelang SBI tenor satu bulan, sementara untuk tenor tiga bulan lelangnya dilakukan sekali dalam satu bulan.

Lelang SBI dilakukan untuk menyerap uang yang ada di masyarakat atau perbankan, biasa disebut likuiditas. Makin besar kelebihan likuiditas biasanya semakin besar pula dana yang akan diserap Bank Indonesia. Dengan menyerap kelebihan likuiditas itu berarti Bank Indonesia mengurangi ruang gerak pemilik dana melakukan spekulasi, sehingga rupiah tidak terpuruk. Dengan berkurangnya likuiditas berlebihan itu juga dapat mengerem laju inflasi yang diakibatkan melonjaknya permintaan barang dari uang yang berlebihan tadi.

2.5.1 Karakteristik SBI

Karakteristik SBI antara lain:

1. Jangka waktu maksimum 12 bulan dan sementara waktu hanya diterbitkan untuk jangka waktu 1 dan 12 bulan.
2. Denominasi, dari yang terendah Rp 50 juta sampai dengan tertinggi Rp 100 milyar.
3. Pembelian SBI oleh masyarakat minimal Rp 100 juta dan selebihnya dengan kelipatan Rp 50 juta.

4. Pembelian SBI didasarkan pada nilai tunai yang diperoleh dari rumus berikut:

$$\frac{\text{Nilai Nominal} \times 360}{360 + (\text{Tingkat Diskonto} \times \text{Jangka Waktu})}$$
5. Pembeli SBI memperoleh hasil berupa diskonto yang dibayar di muka. Besarnya diskonto adalah nilai nominal dikurangi dengan nilai tunai.
6. Pajak penghasilan (PPh) atas diskonto dikenakan secara final sebesar 15%.

2.5.2 Tujuan Penerbitan SBI

Sebagai otoritas moneter, BI berkewajiban memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam paradigma yang dianut, jumlah uang primer (uang kartal + uang giral di BI) yang berlebihan dapat mengurangi kestabilan nilai rupiah. SBI diterbitkan dan dijual oleh BI untuk mengurangi kelebihan uang primer tersebut.

Sejalan dengan ide dasar penerbitan SBI sebagai salah satu piranti Operasi Pasar Terbuka, penjualan SBI diprioritaskan kepada lembaga perbankan. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan masyarakat baik perorangan maupun perusahaan untuk dapat memiliki SBI. Pembelian SBI oleh masyarakat tidak dapat dilakukan secara langsung dengan Bank Indonesia, melainkan harus melalui bank umum serta pialang pasar uang dan pialang pasar modal yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

2.5.3 Pengaruh SBI Terhadap NPL

Secara teoritis salah satu kebijakan moneter adalah melalui pengendalian suku bunga. Bank sentral meyakini melalui perubahan suku bunga kegiatan ekonomi dan tujuan kebijakan moneter dapat dicapai. Melalui peningkatan suku bunga, Bank Indonesia meyakini stabilitas harga dapat dikendalikan. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Melalui peningkatan suku bunga, biaya dana dan biaya modal akan menjadi meningkat. Dengan peningkatan biaya tersebut, keinginan untuk melakukan investasi

dan konsumsi menjadi lebih rendah dan pada gilirannya hal tersebut akan mengurangi permintaan agregat dan akhirnya mengendalikan investasi.

Secara teoritis jika inflasi di Indonesia sedang tinggi maka pemerintah (dalam hal ini BI) akan berusaha mengendalikan laju inflasi tersebut dengan cara menaikkan suku bunga BI *rate*. Dengan naiknya suku bunga BI *rate* maka akan mengakibatkan naiknya suku bunga SBI. Oleh karena suku bunga SBI merupakan salah satu patokan dalam menentukan suku bunga di dalam negeri, maka dengan naiknya suku bunga SBI akan mendorong naik suku bunga deposito. Dengan naiknya suku bunga deposito maka biaya yang dikeluarkan perbankan untuk menghimpun dana pihak ketiga tersebut juga meningkat sehingga biaya dana (*cost of fund*) perbankan akan meningkat. Jika ini terjadi maka suku bunga pinjaman perbankan juga akan meningkat sehingga kemungkinan terjadinya pinjaman bermasalah (*non performing loan*) semakin besar (Basri 2002, hal 85).

Julaihah dan Insukindro, menjelaskan dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan (2004, hal 326), bahwa suku bunga SBI mampu mempengaruhi pergerakan suku bunga deposito satu bulan, dengan meningkatnya suku bunga deposito maka dapat berimbas kepada kredit macet perbankan.

Boye (2007) menjelaskan bahwa *when interest rates and/or debt are rising, a larger share of borrowers' current income will be used for interest payments. In isolation, this will contribute to increasing the number of borrowers with debt-servicing problems and we expect the volume of problem loans to rise.*

Selain itu Bank Indonesia juga menjelaskan dalam laporan Kebijakan Moneter (2008, hal 20), bahwa kenaikan BI *rate* diikuti dengan kenaikan suku bunga deposito. Kenaikan BI *rate* juga semakin ditransmisikan ke suku bunga kredit. Sampai dengan dua bulan pertama triwulan III-2008, kenaikan BI *rate* telah ditransmisikan pada naiknya rata-rata tertimbang seluruh suku bunga kredit. Dengan

naiknya suku bunga kredit diikuti pula dengan naiknya kredit bermasalah perbankan nasional.

2.6 Nilai Tukar

Kurs mata uang asing adalah harga dalam negeri dari mata uang luar negeri (asing) (Hendry 2001, hal 25). Sedangkan Fabozzi (2003, hal 53) menyatakan bahwa kurs adalah *an exchange rate is defined as the amount of one currency that can be exchanged for a unit of another currency.*

Kurs dibedakan menjadi dua (Mankiw 2007, hal 128), yaitu:

1. Kurs nominal (*nominal exchange rate*), yaitu harga relatif dari dua mata uang dua Negara. Sebagai contoh, jika kurs antara dollar AS dan Yen Jepang adalah 120 yen per dollar, maka anda bisa menukar 1 dollar AS untuk 120 yen Jepang di pasar uang.
2. Kurs riil (*real exchange rate*), yaitu harga relatif dari barang-barang di antara dua Negara.

Nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang Indonesia menggambarkan kestabilan ekonomi di negara Indonesia. Makin tinggi nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang Indonesia, makin rendah tingkat kestabilan ekonomi di negara ini. Nilai tukar memiliki peranan sentral dalam hubungan perdagangan internasional, karena nilai tukar memungkinkan kita untuk membandingkan harga-harga segenap barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai negara.

Sejak 14 Agustus 1997, Indonesia menerapkan sistem mengambang bebas (*free floating rate system*). Pada sistem ini, nilai tukar dibiarkan bergerak naik turun sesuai dengan kondisi permintaan dan penawaran mata uang. Pergerakan ini mempengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan dan kinerja perusahaan secara mikro.

Nilai tukar memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap pelaku ekspor dan impor di suatu negara. Dalam arti bahwa penurunan nilai tukar (mata uang domestik nilainya turun terhadap mata uang asing) maka hal ini akan menguntungkan para eksportir, sebab para eksportir akan mendapat keuntungan yang lebih besar dari selisih penurunan kurs mata uang domestik terhadap kurs mata uang asing tersebut (keuntungan jangka pendek). Begitu pula jika nilai tukar mengalami kenaikan (mata uang domestik nilainya naik terhadap mata uang asing), maka akan mengakibatkan peningkatan impor, sebab barang-barang yang di impor harganya menjadi lebih murah.

Dalam pasar valas terdapat transaksi-transaksi valuta asing (Siamat 2001, hal 67), antara lain:

1. Transaksi *spot*, yaitu jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank akan diselesaikan pada dua hari kerja berikutnya.
2. Pasar *forward*, yaitu transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang tertentu lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang.
3. Pasar *swap*, yaitu pembelian dan penjualan pada saat yang bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan mata uang lainnya, dengan dua tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda-beda.

Ketiga jenis pasar tersebut melibatkan antara pembelian dan penjualan valuta asing pada suatu waktu dimasa depan dengan harapan pergerakan kurs yang lebih baik dimasa depan.

2.6.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurs

Perubahan dalam permintaan dan penawaran suatu valuta, yang selanjutnya menyebabkan perubahan dalam kurs valuta, disebabkan oleh banyak faktor (Sukirno 2004, hal 402). Dan yang terpenting diantaranya adalah:

1. Perubahan dalam citarasa masyarakat.

Citarasa masyarakat mempengaruhi corak konsumsi mereka. Maka perubahan citarasa masyarakat akan merubah corak konsumsi mereka atas barang-barang yang diproduksi didalam negeri maupun yang diimpor. Perbaikan kualitas barang-barang dalam negeri menyebabkan keinginan mengimpor berkurang dan ia dapat pula menaikkan ekspor. Sedangkan perbaikan kualitas barang-barang impor menyebabkan keinginan masyarakat untuk mengimpor bertambah besar.

2. Perubahan harga barang ekspor dan impor.

Harga suatu barang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan apakah suatu barang akan diimpor atau diekspor. Jika harga barang-barang impor semakin murah maka akan meningkatkan jumlah barang impor. Dan sebaliknya jika harga barang-barang impor semakin mahal, maka akan mengurangi barang impor. Dengan demikian perubahan harga barang ekspor dan impor akan menyebabkan perubahan dalam penawaran dan permintaan atas mata uang negara tersebut.

3. Kenaikan harga umum (inflasi).

Inflasi sangat besar pengaruhnya kepada kurs pertukaran valuta asing. Jika inflasi menyebabkan harga-harga di dalam negeri lebih mahal dari harga-harga di luar negeri maka inflasi berkecenderungan akan menambah impor sehingga akan menyebabkan penawaran mata uang negara itu lebih cepat bertambah dari permintaannya sehingga nilai mata uang negara tersebut akan melemah. Sebaliknya jika inflasi menyebabkan harga barang-barang ekspor menjadi lebih murah, maka permintaan atas mata uang negara itu akan bertambah sehingga nilai mata uang negara tersebut akan naik.

4. Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi.

Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat penting peranannya dalam mempengaruhi aliran modal. Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang rendah cenderung akan menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri. Sedangkan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi akan menyebabkan modal asing masuk ke negara itu. Apabila lebih banyak modal

asing masuk ke suatu negara, permintaan atas mata uangnya bertambah sehingga nilai mata uang tersebut akan bertambah. Nilai mata uang suatu negara akan merosot apabila lebih banyak modal negara dialirkan ke luar negeri karena suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi di Negara-negara lain.

5. Pertumbuhan ekonomi.

Efek yang akan diakibatkan oleh suatu kemajuan ekonomi kepada nilai mata uangnya tergantung kepada corak pertumbuhan ekonomi yang berlaku. Apabila kemajuan itu diakibatkan oleh perkembangan ekspor, maka permintaan atas mata uang negara itu akan bertambah sehingga nilai mata uang negara tersebut akan naik. Tetapi jika kemajuan ekonomi disebabkan oleh impor maka penawaran mata uang negara itu lebih cepat bertambah dari permintaannya sehingga nilai mata uang negara tersebut akan melemah.

2.6.2 Pengaruh Kurs Terhadap NPL

Hasil riset BI (2002, hal 48) menunjukkan bahwa jika suatu negara memiliki pinjaman dalam bentuk valuta asing dalam jumlah yang besar, baik itu dilakukan oleh bank, lembaga keuangan, ataupun nasabah bank, maka kondisi tersebut telah menyebabkan sistem keuangan secara keseluruhan rentan terhadap gejolak nilai tukar. Penurunan rupiah terhadap valuta asing utama menyebabkan pinjaman dalam mata uang asing meningkat nilainya secara relatif sesuai dengan penurunan tersebut. peningkatan jumlah kewajiban tersebut berdampak kepada kemampuan membayar kewajiban yang semakin menurun, bahkan dalam banyak kasus mengakibatkan ketidakmampuan membayar dan meningkatkan besaran NPL.

Perbankan menghadapi risiko penurunan kualitas kredit valuta asing (valas) jika rupiah tiba-tiba ambruk karena dana global hengkang mendadak (Troy 2009, paragraf 24 – 26). Kredit bermasalah pada pinjaman berdenominasi dollar AS akan melonjak selain utang valas yang akan membengkak jika asing menarik dananya dari pasar

keuangan dalam negeri. Kalau bank menerbitkan surat utang dollar AS dan menyalurkan kredit dalam mata uang rupiah, maka utangnya bisa membengkak.

Dradjad (2008, paragraf 7) menyebutkan bahwa para bankir jelas akan menghadapi masalah besar karena depresiasi rupiah akan membuat portofolio aset perbankan dalam bentuk kredit semakin memburuk. Celaknya lagi, upaya BI menahan laju pelemahan rupiah dengan jalan menaikkan suku bunga justru berpotensi meningkatkan NPL.

Sasara menjelaskan dalam *Economic Review* (2008, hal 4), bahwa dampak krisis *financial* global pada tahun 2008 ke sektor ekonomi akan terjadi jika terjadi pelarian modal, yang mengakibatkan kurs rupiah melemah tajam dan suku bunga meningkat yang bertahan selama lebih dari 3 bulan. Akibat anjloknya nilai rupiah, inflasi akibat impor (*imported inflation*) akan melonjak sehingga biaya produksi meningkat tajam. Kondisi ini akan mengakibatkan daya saing produk Indonesia menurun di pasar internasional karena harganya menjadi lebih mahal untuk mengejar naiknya harga bahan baku. Selain itu di dalam negeri juga akan tersaingi oleh produk sejenis dari negara-negara lain yang lebih murah harganya (Cina, Vietnam, dll). Pada akhirnya, industri dalam negeri akan kesulitan berproduksi dan kondisi bertambah berat jika bank-bank juga untuk sementara menghentikan pemberian kredit melihat situasi yang kurang kondusif. Kemungkinan terburuk adalah ketidakmampuan industri untuk mengembalikan cicilan hutang kepada bank, yang pada akhirnya akan meningkatkan kredit bermasalah bank.

Krisis moneter yang melanda Indonesia diawali dengan terdepresiasinya secara tajam nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (terutama dolar Amerika). Karena gagal mengatasi krisis moneter dalam jangka waktu pendek, menyebabkan kenaikan tingkat harga terjadi secara umum, akibatnya angka inflasi nasional melonjak cukup tajam dan mengakibatkan pendapatan riil rakyat semakin merosot. Dengan terdepresiasinya

nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing juga menyebabkan melemahnya *non performing loan* perbankan nasional (Atmadja 1999, hal 55).

Sebenarnya untuk perubahan nilai tukar rupiah, memberikan pengaruh yang berbeda terhadap debitur bank. Dengan asumsi tidak dilakukan *hedging* untuk debitur yang bergerak dalam bidang eksportir, penguatan mata uang rupiah terhadap mata uang asing lain akan mengurangi pendapatannya, namun untuk debitur yang bergerak dalam bidang importir hal sebaliknya yang akan terjadi, yaitu penguatan mata uang rupiah akan menambah pendapatannya. Perbedaan tersebut menyebabkan pengaruh perubahan nilai tukar rupiah terhadap kinerja debitur akan berbeda-beda sehingga pengaruhnya terhadap NPL juga akan berbeda. Apalagi jika suatu bank tidak memberikan pinjaman kepada debiturnya dalam bentuk valuta asing, maka kemungkinan terjadi pelemahan NPL sebagai akibat dari perubahan nilai tukar menjadi kecil.

